

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Bara deforestasi di Indonesia kian meluas, penyebabnya adalah pembalakan liar. Juga konversi hutan untuk pembangunan kelapa sawit dan industri pulp dan paper. Dari pembalakan liar, sejak awal dekade ini, hutan Indonesia seluas 2,8 juta hektar per tahun hilang.

Setali tiga uang, konversi hutan dan industri pulp dan paper juga menjadi faktor penyebab meningkatnya laju deforestasi. Dari konversi hutan diketahui, 15,9 juta hektar hutan alam tropis dibabat. Konversi hutan yang ditujukan untuk pembangunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor peningkatan deforestasi di Indonesia. Sejak menjadi primadona, hutan seluas 15,9 juta hektar hutan alam tropis dibabat. Berbanding terbalik dengan luas lahan, konsesi yang telah ditanami justru tidak mengalami peningkatan berarti. Dari 3,17 juta ha pada tahun 2000, hanya mengalami peningkatan menjadi 5.5 jt ha pada tahun 2004. Lebih dari 10 juta hektar hutan ditinggalkan begitu saja setelah tanam tumbuh di atasnya “dipanen”.<sup>1</sup>

Tak jauh berbeda, persoalan lain muncul dari industri pulp dan paper. Industri ini membutuhkan setidaknya 27,71 juta meter kubik kayu setiap tahunnya (Departemen Kehutanan, 2006). Dengan kondisi Hutan Tanaman Industri untuk pulp yang hanya mampu menyuplai 29,9 persen dari total kebutuhannya, industri ini akan meneruskan aktivitas pembalakan di atas hutan alam dengan kebutuhan per tahun

mencapai 21,8 juta meter kubik. Kayu ini diperoleh dari hutan alam milik afiliasinya maupun dari konsesi mitranya. Belum termasuk plywood dan industri pertukangan lainnya yang kemampuan HTInya hanya mampu menyuplai 25 persen.<sup>2</sup>

### **A. Latar Belakang Masalah**

Deskripsi di atas bertutur tentang dampak negatif kejahatan kehutanan di Indonesia. Jika dikalkuasi, akibat kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, konversi hutan alam, dan sebagainya, Indonesia menderita kerugian ekonomis yang sangat besar. Kerugian ini tak mencakup bencana ekologis yang ditimbulkan oleh kegiatan pembalakan liar, seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi diberbagai sudut Nusantara.

Ketimpangan proses peradilan disebabkan oleh virus korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terkait dengan kepentingan sesaat aparat penegak hukum, bahkan pejabat birokrasi, di seluruh jenjang peradilan, mulai polisi, jaksa, hingga hakim. Sehingga operasi anti pembalakan liar gagal dalam menjerat para cukong kelas kakap dan para pelindungnya di kepolisian dan militer.

Pola perspektif hidup dan tata nilai yang dipijak oleh masyarakat, Perhutani, pemerintah baik lokal maupun pusat menjadi faktor pokok kian derasnya laju kejahatan kehutanan. Dalam perspektif masyarakat, hutan memiliki fungsi melindungi pemukiman mereka dari angin ribut, kekeringan, dan erosi. Seperti halnya Perhutani yang meyakini fungsi ekologis hutan. Uniknya, perambahan dan

pembalakan liar terus terjadi seiring kalkulasi ekonomis yang dianut Perhutani. Tak jauh berbeda, pemerintah pun bertolak dari aspek ekonomis hutan ketimbang fungsi ekologisnya. Bagi pemerintah, hutan adalah sumber daya yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah-ruah. Karenanya, amat diperlukan bagi pemerolehan pendapatan nasional. Namun, kebijakan pembangunan yang dijalankan tak berpihak pada keberlanjutan hutan.

Laju kejahatan kehutanan seperti pembalakan liar, konversi hutan tanpa tanam kembali, dan dahaga tanpa batas industri pulp dan paper, mengharuskan pemerintah untuk menghentikan berbagai bentuk kejahatan kehutanan yang berpotensi memunculkan deretan bencana ekologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan. Di samping itu, keterlibatan masyarakat (terlebih masyarakat adat) dalam menjaga kelestarian hutan amat diperlukan. Tak hanya sebatas itu, keseriusan segenap aparat penegak hukum menjadi kata kunci penyelesaian arus deforestasi akibat kejahatan kehutanan. Tanpa keseriusan dan keterlibatan berbagai pihak dalam melakukan pengawasan, bukan mustahil hutan Indonesia lekas gundul dalam jangka waktu yang tak panjang.

Akhirnya, deforestasi sebagai akibat illegal logging setidaknya disebabkan oleh tidak adanya pengakuan pemerintah terhadap hak rakyat, maraknya korupsi di sektor pengelolaan sumber daya hutan dan lebarnya jarak antara penawaran dan

dalam jangka waktu yang tak panjang, dan berakibat pada kemiskinan yang akan bertambah, baik dari segi kuantitas maupun kualitas penderitaan kaum miskin.

Kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2007 juga telah menjadi pemicu meningkatnya pemanasan global di peringkat ketiga.<sup>3</sup> Hilangnya sebagian hutan berarti meningkatnya pelepasan emisi ke udara dan membuat suhu pemanasan global meninggi.

Ekspansi dan peningkatan produksi industri kehutanan telah melebihi kemampuan perkebunan-perkebunan yang sangat besar untuk memasok bahan baku dan telah mendorong perluasan perkebunan lebih jauh menembus hutan alam. Pada tahun 2000-2004, angka kerusakan meningkat. Badan Planologi Departemen Kehutanan memperkirakan angka 3,4 juta hektar hutan rusak setiap tahunnya. Pada tahun 2005 dan 2006 . Angka kerusakan turun kembali menjadi 2,7 – 2,8 juta hektar per tahun. Faktor penyebabnya bukan lagi semata penebangan legal dan ilegal untuk pemenuhan industri, namun pembukaan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2003, industri kehutanan mengalami defisit sampai dengan 63 persen. Pada tahun 2006, hutan alam dan HTI ditambah kayu tebangan dari perluasan perkebunan hanya mampu memenuhi 48,62 persen dari kebutuhan. Sisanya, sebesar 51 persen dipenuhi dari tebangan ilegal.<sup>4</sup> Bila masalah celah (*gap*) yang cukup besar ini tidak diperbaiki dari sekarang, diperkirakan pada tahun 2020 hutan alam Indonesia kecuali di hutan lindung dan kawasan konservasi akan musnah. Hal ini akan berpengaruh besar

---

<sup>3</sup> <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2999354,00.html> diakses pada tanggal 25/11/08

<sup>4</sup> <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2999354,00.html> diakses pada tanggal 01/11/08

terhadap sejumlah industri yang ada di Indonesia. Sepuluh tahun dari sekarang sekitar dua pertiga industri kehutanan akan gulung tikar dan sekitar 1,982 juta kepala keluarga yang bekerja sebagai buruh akan kehilangan pekerjaan.

Dalam masalah kerusakan hutan ini, WALHI mengusulkan adanya program Jeda Tebang kepada Pemerintah. Secara definisi Jeda Tebang adalah berhenti sejenak dari aktivitas penebangan dan konversi hutan. Tujuannya adalah untuk mengambil jarak dari masalah agar didapat jalan keluar yang bersifat jangka panjang dan permanen. Program Jeda Tebang dapat dilaksanakan minimal selama 15 tahun. Jeda Tebang memiliki lima tahapan dan dilaksanakan selama tiga tahun pertahapan. Langkah-langkah Jeda Tebang dapat dilakukan selama tiga tahun dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:<sup>5</sup> Tahap pertama, penghentian pengeluaran ijin-ijin baru. Penghentian pemberian atau perpanjangan ijin-ijin baru HPH, IPK, perkebunan, serta mengeluarkan kebijakan impor bagi industri olah kayu. Jeda perizinan adalah syarat mutlak dan menjadi bagian sekaligus tahap pertama pelaksanaan Jeda Tebang di Indonesia. Tahap kedua, pelaksanaan uji menyeluruh kinerja industri kehutanan. Pada tahap ini dalam waktu 2 bulan setelah Jeda Tebang, penilaian asset industri-industri bermasalah harus dilaksanakan melalui due diligence secara independen oleh pihak ketiga. Sehingga pada tahap ini pemerintah dapat mengimplementasikan komitmen penutupan industri sarat utang dan komitmen rekalkulasi nilai sumber daya hutan. Tahap ketiga, penyelamatan hutan-hutan yang paling terancam. Dalam waktu 6

---

<sup>5</sup> *Jeda Tebang Sekarang, Usulan Proses Pelaksanaan Komitmen Pemerintah Indonesia untuk*

bulan, pemerintah harus menghentikan seluruh penebangan kayu di Sumatera dan Sulawesi, kedua pulau ini hutannya sangat terancam. Pada tahap ketiga ini, pemerintah dapat melaksanakan komitmen restrukturisasi industri olah kayu, komitmen pengaitan program reforestasi dengan kapasitas industri, komitmen desentralisasi urusan kehutanan, dan komitmen penghentian penebangan hutan secara liar

Tahap keempat, penghentian sementara seluruh penebangan hutan dan penyelesaian masalah-masalah potensi sosial. Dalam waktu satu tahun jeda tebang dilaksanakan, pemerintah dapat menghentikan seluruh kegiatan penebangan kayu di Kalimantan dan penanganan masalah sosial yang muncul sejauh ini dan selama masa Jeda Tebang dilaksanakan melalui sebuah kebijakan nasional. Sedangkan untuk daerah perlu disiapkan Protokol Resolusi Konflik dan Standar Pelayanan Ekologi menjadi wacana yang berkembang luas. Pada tahap ini, langkah-langkah reformasi dapat dilaksanakan dengan melaksanakan komitmen memperbaiki sistem pengelolaan hutan serta komitmen penyusunan program kehutanan nasional. Tahap lima, larangan sementara penebangan hutan di seluruh Indonesia. Dalam waktu 2-3 tahun, penghentian seluruh penebangan kayu di hutan alam untuk jangka waktu yang ditentukan di seluruh Indonesia. Pada masa ini, penebangan kayu hanya diizinkan di hutan-hutan tanaman atau hutan yang dikelola berdasarkan masyarakat lokal. Pada tahap ini, pemerintah dapat menjalankan komitmen penanggulangan kebakaran hutan

Namun usulan jeda terbang ini belum terlaksana karena dianggap merugikan perekonomian Indonesia dan mengakibatkan keterpurukan beberapa industri (Industri pulp dan kertas) di Indonesia atas kurangnya pasokan bahan baku.

Bila kerusakan hutan tidak segera diperbaiki secepat mungkin maka apa yang dikatakan para ahli dari *International Panel on Climate Change (IPCC)* bahwa Pemanasan global berdampak serius pada kehidupan ratusan juta warga di bumi. Dampaknya, seperti laporan 441 pakar Intergovernmental Panel on Climate Change (*IPCC*), 10 April 2007, naiknya suhu permukaan bumi lima tahun mendatang plus dampak lanjutan berupa kegagalan panen, kelangkaan air, lenyapnya spesies, banjir, dan kekeringan. Asia terkena dampak paling parah: produksi pertanian Cina dan Bangladesh anjlok 30 persen, India langka air, dan 100 juta rumah warga pesisir tergenang.<sup>6</sup>

Peningkatan temperature suhu mencairkan es di kutub, seperti halnya Greenland sehingga memperbanyak volume air di laut. Tinggi muka laut diseluruh dunia telah meningkat 10-25 cm selama abad ke-20. Apabila separuh es di Greenland dan Antartika meleleh maka terjadi kenaikan permukaan air laut di dunia rata-rata 6-7 meter. Tinggi kenaikan rata-rata permukaan air laut diukur dari daerah dengan lingkungan yang stabil secara geologi.<sup>7</sup>

Belum lagi kerusakan yang terjadi pada hutan bakau yang di konversi sebagai lahan pertambakan juga menjadi permasalahan di kawasan daerah pesisir.

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akanakah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007, hal. 26

Pertambahan luas areal lahan bakau yang dikonversi menjadi tambak skala besar mencapai 14% pertahun. Perambahan hutan bakau oleh ekspansi industri pertambakan skala besar ini cukup mengkhawatirkan. Kekhawatiran ini dipicu oleh kerusakan tata ekosistem hutan bakau yang berdampak pada timbulnya konflik sosial, menurunnya kualitas hidup masyarakat, juga kualitas perairan dan lahan masyarakat sekitar tambak, akibat aktivitas industri pertambakan. Berkurangnya hutan bakau dapat mempercepat abrasi di daerah pesisir. Selain itu hutan bakau bermanfaat dalam meredam ombak saat pasang.

Merujuk pada data dari Departemen Kelautan dan Perikanan (2005) tentang perkembangan industri pertambakan, dapat disebut, “Negara menderita kerugian sebesar US\$ 28 miliar per tahun akibat hancurnya hutan bakau . Nominal kerugian ini akan terus bertambah, jika pemerintah Indonesia tidak memberlakukan jeda ekspansi industri pertambakan dan melakukan upaya rehabilitasi terhadap kerusakan hutan bakau,” tukas Riza Damanik, Manajer Kampanye Pesisir dan Kelautan WALHI.<sup>8</sup>

Apabila para peneliti dan ilmuwan mengungkapkan secara gamblang tentang pemanasan global maka kita akan mengetahui betapa dasyatnya efek pemanasan global dalam jangka panjang. Mungkin Indonesia akan kehilangan beberapa pulau atau bahkan kemungkinan Indonesia tenggelam. Dengan naiknya permukaan air laut karena dampak pemanasan global maka satu per satu pulau-pulau di Indonesia akan tenggelam. Dari hasil pendataan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP), selama

dua tahun (2005-2007) terakhir ada 24 pulau yang tenggelam karena penggalian pasir, erosi dan perubahan alam. Rinciannya sebagai berikut. Di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), Sumatera Utara, dan Papua masing-masing kehilangan tiga pulau. Lima pulau tenggelam di Kepulauan Riau. Sumatera Barat kehilangan dua pulau dan Sulawesi Selatan kehilangan satu pulau. Kepulauan Seribu yang berada di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kehilangan tujuh pulau. Diperkirakan sekitar 2.000 pulau akan tenggelam pada tahun 2030-2050 karena pemanasan global.<sup>9</sup>

Lebih dari dua pertiga kota-kota di dunia akan terkena dampak pemanasan global. salah satunya Jakarta dan kota-kota besar di Indonesia yang sebagian besar berada di dekat laut. Jakarta adalah kota yang 70% wilayahnya berada di kawasan pantai yang berelevansi rendah yang terancam oleh naiknya permukaan laut akibat pemanasan global. Negara-negara lain yang terancam selain Indonesia adalah Jepang, Cina, Bangladesh, Vietnam, dan Amerika Serikat.<sup>10</sup>

Kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan dinilai masih sangat rendah. Dilihat dari segi pendidikan, dimana sebagian masyarakat masih minim pengetahuan tentang lingkungan. Contoh kecil yang sering kita lihat adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan meski telah disediakan tempat sampah. Pendidikan mengenal lingkungan perlu dilakukan pada usia sedini mungkin, sehingga dapat memupuk kecintaan akan lingkungan hidup.

---

<sup>9</sup> Suara Pembaharuan, 17 Juni 2007

<sup>10</sup> Gatut Susanta dan Hari Sutjahjo, *Akankah Indonesia Tenggelam Akibat Pemanasan Global?*, Penebarplus+, Jakarta, 2007, hal. 38

Kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini telah memperburuk kondisi alam dan memicu perubahan iklim. Kemajuan teknologi juga perlu memerhatikan lingkungan. Sampai sekarang ini pengguna kendaraan bermotor dari tahun ke tahun terus meningkat belum lagi dengan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri. Peningkatan emisi yang terjadi dari aktivitas kehidupan masyarakat dunia dalam memenuhi kelangsungan hidup perlu dibatasi.

Upaya WALHI dalam berperan aktif di lingkungan internasional adalah dengan menjadi anggota Friends of Earth International (FoE International). FoE International ini memiliki anggota dari organisasi-organisasi lingkungan hidup dari Negara-negara di dunia. FoE International menganggap bahwa perubahan iklim sangat mengkhawatirkan kondisi bumi, dan perlu adanya upaya-upaya yang serius dalam mengatasinya.

Eksekutif Daerah WALHI di Kalimantan pada tahun 2005, yaitu Berry Nahdian Forqon (Kalimantan Selatan), Yohanes (Kalimantan Barat), Syarifuddin (Kalimantan Timur) dan Nordin (Kalimantan Tengah) mendirikan Save Our Borneo (SOB) yang disahkan dengan akte notaris Ellys Nathalia, SH dengan akta nomor 24 tanggal 29 Maret 2006.<sup>11</sup> Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan semuanya, SOB yang semula adalah merupakan program internkoneksi antar WALHi se-Kalimantan di kukuhkan sebagai lembaga pada bulan Maret tahun 2006 yang berkedudukan di Palangkaraya.

SOB di bentuk dengan bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan Kalimantan dilaksanakan secara adil dan demokratis melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih yang menghormati Hak Azasi Manusia, nilai-nilai kearifan masyarakat adat dan budaya lokal serta memperhatikan hak rakyat atas keberlanjutan kehidupan antar generasi.

Lalu pada tanggal 21-22 Agustus 2006, FoE International menghadiri seminar Kapasitas Pembangunan di Asia-Pacific dalam issue tentang tindakan-tindakan masa depan berkaitan perubahan iklim (Capacity Building in Asia and the Pacific on Issues Related to Future Actions on Climate Change).<sup>12</sup> Proyek ini adalah suatu prakarsa untuk memudahkan intra-regional bertukar pendapat tindakan apa bisa diterima perubahan iklim antar negara-negara Asia-Pacific, terutama antara negara berkembang. Yang akhirnya, juga mengizinkan negara-negara Asia-Pacific untuk berunding bila ada negosiasi internasional formal. Peneliti dari berbagai negara-negara dilibatkan didalam proyek yang akan berbagi studi dari negara-negara masing-masing. Negara-negara tersebut adalah Banglades, China, India, Indonesia, Jepang, Thailand.

Anggota-anggota federasi Friends of the Earth International yang berkumpul di Bogor, tanggal 23-25 April 2007 menyimpulkan bahwa perubahan iklim adalah alarm terakhir dari gagalnya model pembangunan yang berlaku sekarang. FOE meminta agar kompensasi yang diberikan atas emisi gas rumah kaca pada negara

berkembang bukan dalam bentuk sumbangan, tetapi lebih pada pemenuhan kewajiban negara maju sesuai dengan ketentuan Protokol Kyoto karena mereka telah menghasilkan gas rumah kaca yang banyak. Selain itu, desakan agar emisi rumah kaca segera dikurangi juga kuat. Pertemuan ini merupakan persiapan masyarakat sipil terhadap putaran perundingan negara-negara penandatanganan Protokol Kyoto-UNFCCC di Bali Desember 2007.<sup>13</sup>

WALHI juga mendirikan Forum Masyarakat Sipil Indonesia Untuk Keadilan Iklim (Civil Society Forum for Climate Justice) terbentuk atas konsensus yang disepakati pada 21 Mei 2007 dalam rangka acara COP 13/CMP 3. CSF untuk Inisiatif Keadilan Iklim adalah batu loncatan yang strategis untuk aksi nyata untuk solusi permanen dari penderitaan yang masih dan selalu berlangsung dan membebani tingkat populasi yang sangat tinggi di Indonesia. Forum ini akan mengakomodir setiap ketertarikan dari CSO dan Organisasi Masyarakat (PO), terutama bagi mereka yang mewakili suara dari komunitas rentan untuk proses politis dalam rapat UNFCCC. Gerakan strategis telah dimulai untuk menekan Pemerintah Indonesia agar lebih relevan dengan keadaan realitas dari komunitas yang rentan dan paling terkena dampak.<sup>14</sup>

*International Panel on Climate Change (IPCC)* adalah sebuah kelompok peneliti khusus yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk

---

<sup>13</sup> *Friends of the Earth Minta Indonesia Pelopori Penurunan Emisi di Negara Maju*, [http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/070425\\_foe\\_emisi\\_cu/](http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/iklim/070425_foe_emisi_cu/) diakses tanggal 22 Februari 2008

<sup>14</sup> *Wiki-CSF for Climate Justice:Perihal*, <http://wiki.csoforum.net/index.php?title=Wiki->



pembangkit listrik tenaga batubara tidak dihitung sebagai biaya yang harus ditanggung.<sup>16</sup>

Sementara untuk para pemilik lahan (hutan) yang menjadi penyerap karbon akibatnya harus bertanggung jawab terhadap keberlangsungan lahannya. Maka diperlukan pendapatan bagi pemilik lahan untuk memelihara lahannya. Pemilik lahan biasanya negara-negara berkembang, sedangkan penghasil karbon adalah negara-negara industri maju. Jadi negara-negara berkembang bisa memelihara hutannya dengan kompensasi dari negara-negara maju, sehingga semua pihak bertanggung jawab untuk pengelolaan karbon di bumi.

Perubahan iklim tidak mengenal batas negara namun distribusi dan dampaknya tidak seimbang dan adil, dimana sebagian besar rata-rata warga negara Amerika menghasilkan 6 ton karbon per tahun dan rata-rata seorang warga Eropa menghasilkan hampir 3 ton karbon pertahun, sedangkan di negara berkembang lainnya masih dalam kondisi miskin.<sup>17</sup> Pada tahun-tahun terakhir (2007), bencana iklim telah mengambil nyawa lebih dari 3 juta orang dunia, 800 juta korban dan kerusakan-kerusakan langsung yang melebihi 23 miliar dolar, dan dari semua kerusakan-kerusakan itu 90% terjadi di negara-negara berkembang. Setiap warga negara memiliki hak atas kehidupan dan pembangunan.

---

<sup>16</sup> *Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007*, [http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi\\_Perubahan\\_Iklim\\_PBB\\_2007](http://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Perubahan_Iklim_PBB_2007) di download tanggal 28 Januari 2008.

<sup>17</sup> *Keadilan Iklim versus Penjajahan Baru*, <http://www.walhi.or.id/>

## B. POKOK PERMASALAHAN

Adapun pokok permasalahan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:  
“Bagaimana upaya WALHI menangani pemanasan global di Indonesia pasca Konferensi Perubahan Iklim PBB 3-15 Desember 2007?”

## C. KERANGKA DASAR PEMIKIRAN

Sesuai dengan pokok permasalahan di atas maka penulis mencoba mengkaji permasalahan tersebut dengan bertumpu pada kerangka pemikiran yang dikemukakan oleh Harold dan Margaret Sprouts tentang lingkungan yaitu “*Man-Milieu Relationship*”<sup>18</sup>.

Menurut Harold dan Margaret Sprouts bahwa masyarakat politik memiliki basis geografis untuk menerangkan tingkah laku politik. Masing-masing masyarakat politik terletak pada suatu wilayah yang merupakan kombinasi unik dalam hal lokasi, ukuran, bentuk, iklim, dan sumber-sumber alamnya. Harold dan Margaret Sprouts juga mengungkapkan bahwa sebagian terbesar aktivitas manusia dipengaruhi oleh distribusi yang tidak rata dari sumber-sumber *human* dan *non human*. Faktor-faktor lingkungan yang *human* dan *non human* mempengaruhi kegiatan manusia hanya dalam dua segi. Pertama, faktor-faktor itu bisa mempengaruhi keputusan-keputusan manusia hanya jika manusia memperhatikannya. Kedua, faktor-faktor itu dapat

---

<sup>18</sup> James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraf, Jr, *Contending Theories of International Relations : A*



ini melalui pendekatan multilateral yang dipandang lebih baik daripada pendekatan unilateral. Karena masalah lingkungan ini adalah masalah global yang harus ditangani bersama. Farah Sofa (*Friends of the Earth Indonesia (Walhi) On Behalf of Walhi National Executive Office*) dan organisasi non pemerintah yang lain telah memberikan pernyataan pada pertemuan Internasional Informal Menteri-menteri untuk Perubahan Iklim, di Bogor, Indonesia 24-26 Oktober 2007 yang mana menyampaikan perhatiannya atas masalah perubahan iklim dan meminta para wakil Indonesia untuk lebih bijak dalam mengambil keputusan tentang solusi masalah lingkungan di Konferensi Perubahan Iklim PBB.<sup>19</sup> Merujuk pada faktor lingkungan yang *human* dan *non human* itu dapat membatasi tindakan individu atau hasil keputusan individu berdasarkan persepsi-persepsinya tentang lingkungan. Dalam memenuhi setiap kebutuhannya, manusia tidak akan lepas dari lingkungannya. Lingkungan akan selalu menjadi faktor pendukung bagi manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadikan manusia lupa bagaimana memanfaatkan potensial sumber alam yang ada. Konsumsi berlebih terhadap energi fosil seperti minyak bumi, batu bara yang tidak didukung oleh kemampuan resor (sink) untuk menyerap gas-gas seperti karbondioksida (CO<sub>2</sub>), metana (CH<sub>4</sub>), nitrousosida (N<sub>2</sub>O) dan lainnya mengakibatkan konsentrasi gas rumah kaca meningkat. Sehingga suhu permukaan bumi pun juga meningkat dan membawa berbagai konsekuensi antara lain meningkatnya air laut dan terjadinya gangguan pola

---

<sup>19</sup> [http://www.walhi.or.id/konferensi/perubahan-iklim/070704\\_pbbhp\\_iklim\\_sy/](http://www.walhi.or.id/konferensi/perubahan-iklim/070704_pbbhp_iklim_sy/) diakses pada tanggal 12

cuaca. Dengan kata lain, naiknya suhu permukaan bumi yang sering disebut dengan pemanasan global ini membawa dampak perubahan iklim yang sangat ekstrem. Perubahan alam yang sebagian besar disebabkan oleh kelalaian manusia dalam mengelola lingkungannya membawa dampak yang begitu merugikan bagi manusia itu sendiri.

Belum lagi permasalahan lingkungan internal seperti halnya deforestasi hutan Indonesia yang makin lama makin parah dan memicu pemanasan global semakin meningkat, selain itu masyarakat Indonesia yang lebih mementingkan hutan sebagai lahan ekonomi tanpa peduli akan fungsi hutan sebagai pelindung bumi. Meskipun dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa lepas dari lingkungannya, haruslah ada batasan-batasan dalam aktivitasnya mengelola lingkungan. Teknologi juga berperan dalam aktivitas manusia memenuhi kebutuhannya.

Sprouts menekankan bahwa teknologi dan perubahan sosial memainkan peranan penting dalam hubungan manusia dengan lingkungannya.<sup>20</sup> Semakin majunya teknologi membuat manusia dalam mengelola lingkungannya tidak mengindahkan batasan yang harus mereka ikuti. Akibatnya bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat politik dunia saat ini. Yang paling merasakan dampaknya yaitu negara sedang berkembang (*Developing Countries*). Dalam hal ini penulis menunjuk Indonesia sebagai salah satu negara sedang berkembang yang ikut merasakan dampak buruk dari perubahan iklim yang non human yaitu pemanasan global. Menurut

---

<sup>20</sup> James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraf, Jr, *Contending Theories of International Relations : A Comparative Survey*, Third Edition, Harper-Collins Publisher, New York, 1990, Hal : 69

Sprouts sangatlah bertentangan dengan realitas kondisi lingkungan sekarang ini. Limitasi dalam pemanfaatan kemajuan teknologi yang diungkapkan Sprouts malah tidak diterapkan. Kemajuan teknologi justru dimanfaatkan oleh sebagian besar negara maju untuk melakukan aktivitas kegiatan industrinya hingga kelewat batas dan sumber daya alam menjadi terkikis besar-besaran.

Oleh karena itu sebagian besar dari masyarakat politik dunia yang sadar akan pentingnya eksistensi sebuah lingkungan membuat sebuah perjanjian lingkungan internasional yang dikenal dengan nama Protokol Kyoto. Lalu pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali telah diselenggarakan Konferensi Perubahan Iklim PBB sebagai pertemuan lanjutan untuk mendiskusikan persiapan negara-negara di dunia dalam mengurangi efek gas rumah kaca setelah Protokol Kyoto kadaluwarsa pada tahun 2012.<sup>21</sup> Dalam konferensi ini diikuti oleh sekitar sembilan ribu peserta dari 186 negara. Selain itu ada sekitar tiga ratus LSM internasional yang terlibat dan WALHI ikut serta di dalamnya.

Dalam diskusi konferensi, ada dua pihak yang menentukan yakni penghasil emisi dan penyerap emisi. Permasalahan yang sedang ditengahi adalah memberi nilai pada karbon. Selama ini pembangkit listrik tenaga batu bara dinilai lebih murah dibanding pembangkit listrik tenaga geothermal, karena karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga batu bara tidak dihitung sebagai biaya yang harus ditanggung. Sementara untuk para pemilik lahan (hutan) yang menjadi penyerap

---

<sup>21</sup> <http://www.walhi.or.id/berita/berita/2007/12/14/14120701.htm>



## **E. METODE PENELITIAN**

Pengumpulan data penelitian ini akan dilaksanakan dengan studi pustaka (*library research*). Oleh karena itu, data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari literatur-literatur, makalah-makalah ilmiah, jurnal-jurnal ilmiah dan surat kabar. Sedangkan data-data lain diperoleh dari media elektronik yaitu internet yang relevan dengan analisa diatas. Meskipun menganalisa data sekunder, penulis yakin bahwa penelitian ini tidak mengurangi kebenarannya ilmiahnya.

## **F. JANGKAUAN PENULISAN**

Untuk memudahkan penulis di dalam memperoleh data bahan analisa maka penulisan ini memerlukan batasan. Penulisan ini akan membatasi pada kebijakan WALHI setelah diselenggarakan Konferensi Perubahan Iklim pada tanggal 3-14 Desember 2007 di Bali dan lebih lanjut akan berfokus pada bagaimana upaya WALHI dalam menanggulangi pemanasan global.

## **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Adapun sistematika dari penulisan ini ditulis dalam lima bab dengan sub topik pembahasan sebagai berikut :

### **BAB I   Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah,

1.1.1. Tujuan, lingkup, jangkauan penelitian, metode penelitian, dan

## **BAB II Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia**

Bab ini menjelaskan tentang dampak perubahan iklim yang akan terjadi di Indonesia dan usaha WALHI

## **BAB III Konferensi Perubahan Iklim PBB 2007**

Pada Bab ini penulis akan menjelaskan sekilas tentang Konferensi Perubahan Iklim di Bali dan Indonesia setelah Konferensi Perubahan iklim PBB 2007.

## **BAB IV Upaya WALHI Menangani Pemanasan Global**

Penulis akan menjabarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh WALHI setelah adanya Konferensi Perubahan Iklim PBB dalam mengurangi dampak dari pemanasan global

## **BAB V Kesimpulan**

Merupakan kesimpulan yang akan penulis sampaikan mengenai hasil dari penelitian. Dan kemudian sekiranya dapat penulis berikan guna

1. Untuk memahami dampak pemanasan global yang terjadi sekarang ini